**SISTEM PENATAAN ADMINISTRASI TERHADAP PROGRAM PKK DI DISTRIK KALAMONO, KABUPATEN SORONG**

Ana Lestari¹, Agil Saeni², Laila Qadriyani R³.

alannalestari034@gmail.com

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong

*ABSTRACT*

*This study aims to analyse the administrative management system in the implementation of the Family Empowerment and Welfare Programme (PKK) in Kalamono District, Sorong Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the administrative management system of the PKK programme in Kalamono District is not yet functioning optimally. Weaknesses include the absence of standard operating procedures (SOPs) for administration, low capacity of cadres in managing documents and reports, and limited facilities and supporting infrastructure such as computers and internet access. Additionally, coordination between PKK officials and the district government remains weak, and monitoring and evaluation of activities have not been conducted on an ongoing basis. However, some improvement efforts have been made, such as administrative training for cadres, simplification of reporting formats, and proposals for the procurement of supporting facilities. This study recommends the need to establish an integrated digital-based administrative system, provide regular training for cadres, and strengthen cross-sectoral synergies to support the success of the PKK programme at the district level.*

*Keywords: PKK administration, community empowerment, Kalamono district, governance, PKK cadres*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penataan administrasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Distrik Kalamono, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono belum berjalan optimal. Kelemahan terletak pada belum adanya standar operasional prosedur (SOP) administrasi yang seragam, rendahnya kapasitas kader dalam mengelola dokumen dan laporan, serta keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti komputer dan akses internet. Di samping itu, koordinasi antara pengurus PKK dan pemerintah distrik masih lemah, serta monitoring dan evaluasi kegiatan belum dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, telah terdapat beberapa upaya perbaikan, seperti pelatihan administrasi bagi kader, penyederhanaan format pelaporan, serta pengusulan pengadaan sarana pendukung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem administrasi terpadu berbasis digital, pelatihan rutin kader, dan penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program PKK di tingkat distrik.

**Kata kunci**: administrasi PKK, pemberdayaan masyarakat, distrik Kalamono, tata kelola, kader PKK

**PENDAHULUAN**

Program PKK merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga, dalam mendukung pembangunan nasional melalui 10 program pokok. Keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sistem administrasi yang tertata dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Distrik Kalamono sebagai salah satu distrik di Kabupaten Sorong memiliki peran penting dalam menjalankan program PKK. Namun, implementasi program tersebut sering kali dihadapkan pada masalah administratif seperti kurangnya dokumen pendukung kegiatan, laporan yang tidak sesuai format, dan data kegiatan yang tidak terarsipkan secara baik.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif, oleh dan untuk masyarakat. Program PKK menjadi ujung tombak dalam membangun keluarga sejahtera melalui sepuluh program pokok, seperti penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Di Kabupaten Sorong, khususnya di Distrik Kalamono, program PKK telah berjalan selama beberapa tahun. Namun, fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program-program PKK belum sepenuhnya efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya sistem penataan administrasi. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh kader PKK tidak terdokumentasikan secara rapi, laporan kegiatan seringkali tidak sesuai format standar, dan terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar kader PKK di Distrik Kalamono belum mendapatkan pelatihan administrasi yang memadai, sehingga masih terjadi kekeliruan dalam pengisian buku-buku administrasi seperti buku kas umum, buku data keluarga, dan buku kegiatan. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti komputer, printer, dan akses internet di kantor distrik juga menjadi kendala serius dalam pelaporan dan komunikasi antar tingkat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan program yang akuntabel, efisien, dan transparan. Padahal, sistem administrasi yang baik merupakan syarat penting untuk mendukung efektivitas program PKK, termasuk dalam hal perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian akademik mengenai bagaimana sistem penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono berjalan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan PKK di tingkat distrik serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem administrasi program pemberdayaan masyarakat.

**LANDASAN TEORI**

**Teori Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan kebijakan publik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan masyarakat. Menurut **Dwight Waldo (1948)**, administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan sosial yang melibatkan nilai, etika, dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks program PKK, administrasi publik dijalankan oleh lembaga non-formal masyarakat (TP PKK) dengan dukungan pemerintah daerah. Penataan administrasi menjadi elemen penting agar pelaksanaan program berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup pencatatan data kegiatan, manajemen keuangan, pelaporan program, serta pengarsipan dokumen.

**Teori Good Governance**

Menurut **UNDP (1997)**, *good governance* terdiri dari prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penataan administrasi yang baik adalah cerminan dari tata kelola organisasi yang baik, terutama pada organisasi berbasis komunitas seperti PKK.

Dalam kaitannya dengan Distrik Kalamono, prinsip good governance menekankan pentingnya:

1. **Transparansi**, yaitu pelaporan kegiatan PKK yang terbuka dan terdokumentasi;
2. **Akuntabilitas**, yaitu pertanggungjawaban setiap program dan penggunaan dana;
3. **Partisipasi**, yaitu keterlibatan aktif kader PKK dan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program.

**Teori Administrasi Desa dan Kelembagaan Lokal**

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto (2007)**, kelembagaan lokal seperti PKK merupakan bagian dari sistem sosial di tingkat mikro yang mendukung program-program pembangunan nasional. Administrasi desa dan kelembagaan lokal tidak boleh dipandang remeh karena menjadi dasar sistem pelaporan, pengendalian, dan akuntabilitas kebijakan publik di level akar rumput.

PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran administratif dalam pelaksanaan 10 program pokok. Maka, teori administrasi desa menjadi penting dalam memahami:

1. Sistem pelaporan dan pengarsipan di tingkat kampung;
2. Hubungan kerja antara PKK, kepala kampung, dan aparat distrik;
3. Dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi administrasi di wilayah adat seperti di Sorong.

 **Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Teori pemberdayaan masyarakat, menurut Chambers (1993), menekankan pentingnya masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya dalam bentuk fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas manajerial, termasuk kemampuan mengelola administrasi organisasi.

Dalam konteks PKK, pemberdayaan berarti:

1. Meningkatkan kompetensi kader dalam pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi;
2. Membangun sistem administrasi yang memberdayakan, bukan membebani;
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program.

**Teori Manajemen Berbasis Komunitas**

Menurut Korten (1986), keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi lokal untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara mandiri. Salah satu aspek penting dari kapasitas ini adalah sistem administrasi yang baik.

PKK sebagai organisasi komunitas perlu memiliki sistem manajemen yang mendukung keberlanjutan program, termasuk sistem administrasi yang: Mudah dipahami oleh kader. Dapat digunakan untuk pengambilan Keputusan, erintegrasi antara tingkat kampung, distrik, dan kabupaten.

**Implikasi Teoritis terhadap Studi di Distrik Kalamono**

Berdasarkan landasan teori di atas, penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono harus didekati dengan perspektif interdisipliner:

1. Administrasi publik untuk memahami struktur dan sistem pelaporan;
2. Good governance untuk mengevaluasi aspek transparansi dan akuntabilitas;
3. Pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa kader PKK berdaya dan mandiri;
4. Kelembagaan lokal untuk melihat keterkaitan antara pemerintah kampung dan PKK sebagai mitra pembangunan.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi langsung terhadap kegiatan dan dokumentasi administrasi PKK, Wawancara mendalam dengan pengurus PKK tingkat distrik, aparat distrik, dan kader desa, Studi dokumentasi terhadap arsip, laporan kegiatan, dan buku administrasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Bagaimana Sistem Penataan Administrasi Program PKK di Distrik Kalamono**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa sistem penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono masih belum berjalan secara optimal. Penataan administrasi yang mencakup pencatatan data, pelaporan kegiatan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan belum dilakukan secara sistematis, berstandar, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa temuan utama:

1. Ketiadaan Standar Administrasi yang Jelas

Dokumen administrasi yang digunakan oleh kader PKK di tingkat distrik dan kampung masih sangat bervariasi. Tidak terdapat standar operasional prosedur (SOP) resmi yang dijadikan acuan bersama. Format laporan kegiatan, buku data keluarga, dan dokumentasi keuangan kadang tidak seragam antar kampung dalam satu distrik. Akibatnya, kualitas data dan laporan sering tidak konsisten dan sulit dianalisis secara vertikal ke tingkat kabupaten.

1. Keterbatasan Kompetensi SDM

Sebagian besar kader PKK belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan administrasi yang baik. Kurangnya pelatihan teknis administrasi dan terbatasnya pendampingan dari pihak pemerintah distrik menyebabkan banyak kader merasa kesulitan dalam membuat laporan kegiatan, pengisian buku administrasi, serta pengarsipan dokumen. Hal ini berdampak pada rendahnya akurasi dan kelengkapan laporan bulanan atau triwulan.

1. Penggunaan Sistem Manual dan Keterbatasan Teknologi

Administrasi PKK di Distrik Kalamono masih dilakukan secara manual, dengan pencatatan tangan di buku tulis. Belum ada pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan digital, sistem database keluarga, atau pengolahan data kegiatan berbasis komputer. Selain itu, ketersediaan alat seperti komputer, printer, dan jaringan internet sangat terbatas di kantor distrik maupun kampung.

1. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi dari Pemerintah Distrik

Fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah distrik terhadap pelaksanaan administrasi program PKK masih minim. Laporan yang dikumpulkan oleh kader sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak diverifikasi atau dievaluasi secara menyeluruh. Ini menyebabkan proses pelaporan cenderung dilakukan untuk memenuhi tuntutan prosedural, bukan sebagai alat perencanaan dan pengembangan program yang berkualitas.

1. Inisiatif Perbaikan yang Masih Bersifat Individual

Meskipun terdapat beberapa kader yang berinisiatif memperbaiki sistem administrasi dengan membuat dokumen secara rapi dan terstruktur, upaya tersebut masih bersifat personal dan belum menjadi sistem kolektif. Tidak ada sistem evaluasi dan penghargaan yang mendorong replikasi praktik baik ke seluruh wilayah kampung di distrik. Jika ditinjau dari sudut pandang administrasi publik, lemahnya sistem administrasi PKK di Distrik Kalamono disebabkan oleh belum adanya integrasi antara peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dengan kapasitas organisasi masyarakat (PKK) sebagai pelaksana. Dalam kerangka *good governance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi belum terwujud secara menyeluruh dalam pengelolaan administrasi PKK.Selain itu, pendekatan birokrasi yang masih formalistik belum diimbangi dengan penguatan kompetensi kader sebagai pelaku utama di lapangan. Administrasi yang seharusnya menjadi alat pengendali dan pengarah kegiatan justru menjadi beban tambahan karena tidak didukung oleh sistem yang sederhana, jelas, dan aplikatif. Dengan demikian, sistem penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono memerlukan reformasi dalam tiga aspek utama: (1) penyusunan regulasi dan SOP administrasi PKK yang mudah diterapkan, (2) peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, dan (3) digitalisasi sistem pelaporan secara bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

1. **Apa Saja Kendala yang Dihadapi dalam Penataan Administrasi Program PKK di Distrik Kalamono.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader PKK, aparat distrik, serta hasil observasi lapangan, ditemukan berbagai kendala yang signifikan menghambat efektivitas penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mayoritas kader PKK di Distrik Kalamono masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan administrasi yang terbatas. Mereka belum terbiasa menyusun laporan kegiatan secara sistematis, mengelola arsip dokumen, atau membuat perencanaan berbasis data. Selain itu, kurangnya pelatihan atau pembinaan teknis dari pihak pemerintah distrik maupun kabupaten menyebabkan kader bekerja berdasarkan pengalaman seadanya.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa tidak adanya sistem pelatihan berkala dan penguatan kapasitas menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas administrasi. Tanpa investasi pada SDM, sistem administrasi tidak akan berkembang, berapa pun banyaknya peraturan atau perangkat pendukung yang tersedia.

2. Fasilitas dan Infrastruktur yang Minim

Kegiatan administrasi PKK masih dilakukan secara manual karena belum tersedia sarana penunjang seperti komputer, printer, atau alat tulis kantor yang memadai. Di beberapa kampung, bahkan tidak tersedia ruang khusus untuk menyimpan dokumen atau buku kegiatan PKK, sehingga dokumen rentan rusak atau hilang.

Minimnya fasilitas menyebabkan pekerjaan administrasi tidak efisien dan cenderung bersifat sementara. Hal ini juga menyulitkan proses pengarsipan dan evaluasi program di kemudian hari. Selain itu, tidak adanya akses internet membatasi kemungkinan penggunaan sistem administrasi berbasis digital atau daring.

3. Koordinasi yang Lemah antara Kader PKK dan Pemerintah Distrik

Komunikasi antara pengurus PKK kampung dan pihak distrik sering tidak terjadwal secara rutin. Laporan kegiatan kadang tidak dikumpulkan tepat waktu atau tidak diperiksa secara menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa kasus, laporan disusun hanya untuk memenuhi permintaan formal, tanpa ada proses verifikasi atau umpan balik dari aparat distrik.

Lemahnya koordinasi ini mencerminkan kurangnya struktur komunikasi dan pembinaan yang sistematis. Idealnya, ada forum evaluasi bulanan atau triwulanan yang menghubungkan kader, pengurus distrik, dan fasilitator kabupaten agar masalah-masalah teknis bisa dibahas dan diselesaikan secara terbuka.

4. Beban Ganda Kader PKK

Banyak kader PKK di Distrik Kalamono juga merangkap sebagai ibu rumah tangga dan kadang bekerja di sektor informal untuk menambah penghasilan keluarga. Akibatnya, mereka memiliki keterbatasan waktu untuk fokus mengurus administrasi PKK, apalagi bila tidak ada insentif atau dukungan nyata dari pemerintah setempat.

Kondisi ini menyoroti perlunya penguatan insentif non-material dan dukungan sosial terhadap kader PKK. Tanpa adanya penghargaan dan dukungan yang memadai, kader akan sulit menjalankan tugas administratif secara konsisten.

5. Belum Ada Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Terstruktur

Sampai saat ini, belum terdapat sistem monitoring yang menyeluruh terhadap administrasi program PKK, baik di tingkat kampung maupun distrik. Evaluasi biasanya hanya dilakukan saat ada audit atau kunjungan dari kabupaten, sehingga perbaikan bersifat reaktif, bukan preventif.

Ketiadaan sistem pengawasan yang terjadwal dan berbasis indikator kinerja membuat administrasi menjadi kegiatan pelengkap, bukan alat pengambilan keputusan. Ini memperlemah akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program PKK.

Kendala penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono bersifat multidimensi mencakup aspek manusia, sarana, manajemen, dan kelembagaan. Solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif: penguatan kapasitas kader, penyediaan fasilitas, perbaikan komunikasi lintas tingkatan, serta pembentukan sistem evaluasi yang terukur dan berkelanjutan

1. **Bagaimana Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Penataan Administrasi dalam Pelaksanaan Program PKK**

Meskipun menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, terdapat sejumlah upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah distrik, kader PKK, dan mitra kerja untuk memperbaiki sistem penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono. Upaya-upaya ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya administrasi sebagai fondasi keberhasilan program pemberdayaan keluarga.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Dasar bagi Kader PKK

Pemerintah distrik bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong telah memfasilitasi pelatihan dasar mengenai tata cara pencatatan, pelaporan kegiatan, dan pengelolaan arsip bagi para kader PKK kampung. Pelatihan ini mencakup materi tentang penggunaan buku kegiatan, buku kas umum, dan teknik penyusunan laporan sederhana.

Pelatihan ini menjadi langkah awal penting dalam membekali kader dengan keterampilan dasar administrasi. Namun, pelatihan perlu dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pendampingan lapangan agar materi yang diberikan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

2. Penyederhanaan Format dan Standarisasi Dokumen Administrasi

Beberapa pengurus PKK tingkat distrik berinisiatif membuat format-format laporan dan buku catatan yang lebih sederhana dan mudah diisi oleh kader kampung. Format ini disesuaikan dengan kemampuan kader serta kebutuhan pelaporan minimal, misalnya mencatat jenis kegiatan, jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan hasil kegiatan.

Langkah penyederhanaan ini sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan administrasi. Format yang terlalu kompleks cenderung tidak diisi secara benar atau ditinggalkan. Namun demikian, standar yang digunakan masih bersifat lokal dan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan sistem pelaporan tingkat kabupaten.

3. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Lintas Tingkatan

Pemerintah distrik mulai membangun sistem komunikasi yang lebih intensif dengan kader PKK melalui pertemuan rutin bulanan atau triwulan. Dalam forum ini, dibahas capaian kegiatan, kesulitan di lapangan, serta evaluasi terhadap kelengkapan administrasi. Beberapa distrik juga telah menunjuk satu orang koordinator administrasi yang bertugas mendampingi kampung-kampung dalam menyusun laporan.

Koordinasi yang baik akan menciptakan kultur kerja yang lebih tertib dan akuntabel. Penunjukan koordinator administrasi merupakan strategi efisien untuk menjembatani kesenjangan antara kader lapangan dan struktur formal distrik. Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada komitmen dan kapasitas individu yang ditunjuk.

4. Usulan Pengadaan Sarana Penunjang Administrasi

Melalui musyawarah kampung dan distrik, kader PKK mengusulkan pengadaan alat tulis kantor, lemari arsip, serta komputer dan printer sebagai sarana pendukung administrasi. Usulan ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Distrik (RKPD) dan diharapkan dapat diakomodasi melalui Dana Kampung atau program pemberdayaan dari pemerintah daerah.

Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya infrastruktur dalam menunjang kualitas administrasi. Namun, keberhasilan usulan tergantung pada proses perencanaan partisipatif yang efektif serta dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten.

5. Penguatan Peran Mitra dan Lembaga Pendamping

Beberapa kampung di Distrik Kalamono mulai melibatkan pendamping lokal dari LSM atau institusi pendidikan yang membantu dalam proses dokumentasi, pelaporan, dan pelatihan kader. Kolaborasi ini memberi kontribusi positif dalam mempercepat peningkatan kapasitas kader secara praktis.

Sinergi antara kader PKK dan lembaga mitra dapat mempercepat proses transformasi administrasi. Namun, keberlanjutan kerja sama harus dijaga agar tidak hanya bergantung pada proyek-proyek jangka pendek.

Upaya peningkatan penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono telah dimulai, meskipun masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara menyeluruh. Diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, pendampingan teknis berkelanjutan, serta pembentukan sistem informasi administrasi yang terintegrasi agar semua upaya ini dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan merata di seluruh kampung.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem penataan administrasi terhadap program PKK di Distrik Kalamono, Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem administrasi program PKK di Distrik Kalamono belum tertata secara optimal. Proses pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan masih dilakukan secara manual, tidak terstandarisasi, dan kurang konsisten dalam pelaksanaan di setiap jenjang pelaksana PKK.
2. Terdapat sejumlah kendala utama dalam penataan administrasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen administrasi, kurangnya pelatihan bagi kader PKK, minimnya fasilitas penunjang administrasi seperti perangkat komputer dan akses internet, serta lemahnya koordinasi antara pengurus PKK dan aparat pemerintahan distrik.
3. Upaya perbaikan sudah mulai dilakukan, seperti pelatihan dasar administrasi bagi kader, penyusunan format laporan yang lebih sederhana, dan dorongan dari pihak distrik untuk memperkuat tata kelola kelembagaan PKK. Namun, upaya tersebut masih belum menyeluruh dan perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
4. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas administrasi, termasuk penguatan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) administrasi PKK, peningkatan keterampilan kader melalui pelatihan teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah sistem pelaporan dan dokumentasi.
5. Kendala penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono bersifat multidimensi mencakup aspek manusia, sarana, manajemen, dan kelembagaan. Solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif: penguatan kapasitas kader, penyediaan fasilitas, perbaikan komunikasi lintas tingkatan, serta pembentukan sistem evaluasi yang terukur dan berkelanjutan
6. Upaya peningkatan penataan administrasi program PKK di Distrik Kalamono telah dimulai, meskipun masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara menyeluruh. Diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, pendampingan teknis berkelanjutan, serta pembentukan sistem informasi administrasi yang terintegrasi agar semua upaya ini dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan merata di seluruh kampung. Dengan pembenahan sistem administrasi yang baik, program PKK di Distrik Kalamono diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di tingkat akar rumput.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sari, R. (2021). *Manajemen Administrasi PKK di Tingkat Desa*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan, 5(1), 45-53.

Wibowo, A. (2022). *Peran Kader PKK dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 67-75.

Lestari, D. (2020). *Evaluasi Program Pemberdayaan Keluarga Berbasis Partisipatif*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 4(1), 88-96.

Sutrisno, H. (2023). *Strategi Penguatan Sistem Administrasi Desa*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 3(2), 121-130.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Panduan Pelaksanaan Program PKK*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Yusuf, T. (2021). *Model Administrasi Publik Berbasis Partisipasi Komunitas*. Jurnal Inovasi Administrasi, 9(3), 45-55.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat. (2023). *Laporan Tahunan Program PKK Provinsi Papua Barat*.

Rumakiek, J. (2024). *Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan di Sorong Raya*. Jurnal Perempuan dan Pembangunan, 7(1), 23–30

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Panduan Umum Gerakan PKK dan 10 Program Pokok PKK*. Jakarta: Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Sari, R. (2021). *Manajemen Administrasi PKK di Tingkat Desa*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan, 5(1), 45–53.

Yusuf, T. (2021). *Model Administrasi Publik Berbasis Partisipasi Komunitas*. Jurnal Inovasi Administrasi, 9(3), 45–55.

Lestari, D. (2020). *Evaluasi Program Pemberdayaan Keluarga Berbasis Partisipatif*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 4(1), 88–96.

Wibowo, A. (2022). *Peran Kader PKK dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 67–75.

Chambers, R. (1993). *Putting the Last First*. London: Intermediate Technology Publications.

Korten, D. C. (1986). *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Connecticut: Kumarian Press.

Waldo, D. (1948). *The Administrative State*. New York: Ronald Press Company.

Wignjosoebroto, S. (2007). *Pengantar Metode Penelitian Sosio-Legal*. Jakarta: Elsam.

Pemerintah Kelurahan Gadang. (2023). *Pelatihan dan Pembinaan Administrasi PKK Berbasis Sistem Informasi*. Diakses dari: https://kelgadang.malangkota.go.id

Pratiwi, N. A., & Rohmawati, F. (2022). *Implementasi Administrasi PKK melalui Sistem Informasi Berbasis Web di Desa Uma Beringin*. Jurnal Matrik, 5(2), 110–118.

Nugroho, A. (2023). *Penguatan Kelembagaan PKK dalam Perspektif Good Governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 33–42.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat. (2023). *Laporan Evaluasi Program PKK Distrik di Wilayah Sorong Raya*. Sorong: DPMK Papua Barat.

Rumakiek, J. (2024). *Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan di Sorong Raya*. Jurnal Perempuan dan Pembangunan, 7(1), 23–30.

Mandalawangi-Nagreg.desa.id. (2022). *Pembinaan Administrasi Dasawisma TP PKK Desa Mandalawangi*. Diakses dari: https://mandalawangi-nagreg.desa.id